

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara Asia Tenggara dan Australia serta Lautan Hindia dan Lautan Pasifik. Di dalam sebuah negara kepulauan tentunya ada banyak populasi di dalam sebuah negara, berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada tahun 2023 Negara Indonesia tercatat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara yaitu sebanyak 227,43 juta jiwa. Di antara negara yang merupakan negara dari Asia Tenggara atau yang sering dikenal dengan ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) Indonesia merupakan negara yang masih memiliki kategori negara berkembang karena perekonomiannya yang masih tergolong rendah. Upaya yang dilakukan Presiden Indonesia untuk menuju negara maju pada tanggal 8 Juni 2022 Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menjadi landasan hukum percepatan penghapusan kemiskinan menjadi 0% pada tahun 2024. Berikut merupakan peringkat kemiskinan di beberapa negara ASEAN pada tahun 2022.



Gambar 1. 1 Peringkat Kemiskinan Negara ASEAN Tahun 2022

Sumber: DataIndonesia.id

Pada Gambar 1.1 menampilkan bahwa di tahun 2022 Indonesia adalah salah satu negara dengan peringkat kemiskinan tertinggi setelah Kamboja. Tingkat kemiskinan di Indonesia lebih tinggi dari pada negara Thailand yang mencapai angka 6,3%, negara Malaysia 6,2%, dan bahkan Vietnam 6,1%. Pada Tahun 2023 tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan sejak September 2022, Badan Pusat Statistika (BPS) mengungkapkan jumlah penduduk miskin berkurang 0,46 juta orang pada Maret 2023.



Gambar 1. 2 Peringkat Kemiskinan Negara ASEAN Tahun 2023

Sumber: UNDP World Bank, ADB dan Sumber lain

Pada Gambar 1.2 menampilkan bahwa pada tahun 2023 Indonesia masih berada di peringkat keenam pada tingkat kemiskinan, namun masih terdapat sedikit angka penurunan yaitu sekitar 0,07% dari tahun 2022 sehingga pada tahun 2023 . Pada Tahun 2023 Indonesia berada pada 9,5% tingkat penduduk yang mengalami kemiskinan.

Berdasarkan tingkat penurunan angka kemiskinan dari tahun 2022 hingga 2023 Badan Pusat Statistika (BPS) dalam laporannya menyatakan bahwa faktor

yang mempengaruhi turunnya angka kemiskinan yaitu di bulan Agustus 2022 tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,86% menjadi 5,45% di bulan Februari 2023, pada September 2022 nilai tukar petani naik dari 106,82% menjadi 110,85% di bulan Maret 2023, laju inflasi turun dari 3,6 menjadi 1,32 pada bulan Maret 2023, serta konsumsi rumah tangga pada kurata I tahun 2022 naik menjadi 2,21% dibanding kurata III pada 2022. Berdasarkan perkembangan yang terjadi dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial tetap dapat diupayakan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin salah satunya yaitu bantuan dalam bentuk bantuan pangan.

Pada Tahun 2018 bantuan sosial dalam bentuk pangan diluncurkan oleh kementerian sosial dengan sebutan bantuan beras sejahtera yang merupakan bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat berupa beras (*natura*) oleh pemerintah yang disalurkan setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa dikenai biaya dan tebus/harga, beras tersebut disalurkan sebanyak 10 kg dengan kualitas medium. Berdasarkan *website* resmi Badan Pangan Nasional, adanya bantuan beras tersebut pemerintah mengharapkan anggaran keluarga yang digunakan untuk membeli beras sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan lain seperti makanan bergizi tambahan. Dalam upaya kelancaran untuk penyaluran bantuan di daerah yang sulit terjangkau, pemerintah dibantu oleh kepala desa dan perangkat desa dalam proses penyaluran beras mulai dari pendataan hingga proses penyerahan bantuan ke tangan KPM (Keluarga Penerima Manfaat), sehingga program ini dapat dirasakan oleh masyarakat dengan maksimal, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bondowoso.

Bantuan pemerintah pusat turun ke wilayah Kecamatan Bondowoso akan disalurkan kepada masyarakat berdasarkan data yang diperoleh dari pusat pemerintah yang disebut dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) (PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN BANTUAN PANGAN TAHUN 2024, 2024). Data P3KE turun dari pemerintah atas pengajuan data masyarakat oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso. Alur pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan pangan beras tersebut berawal dari

data yang diajukan oleh pihak Kelurahan atau Desa kepada Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso untuk diverifikasi lebih lanjut kepada Pemerintahan Pusat, seperti yang dilakukan oleh Kelurahan Tamansari yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan Bondowoso. Kelurahan Tamansari merupakan perantara yang dapat menyalurkan berbagai jenis bantuan yang berasal dari pemerintah dan juga berperan dalam membantu pengajuan data masyarakat calon menerima bantuan atas dasar saran dari ketua RT yang merupakan bagian dari Kelurahan Tamansari. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 6 Maret 2024 kepada Ibu Sri Ngadiatik, S.Sos selaku koordinator bantuan yang ada di Kelurahan Tamansari bahwa penerima bantuan pangan beras memilih sasaran utama yaitu masyarakat miskin atau masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi yang sesuai dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Penerima Bantuan Pangan. Kategori masyarakat miskin merujuk pada kelompok masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin yaitu masyarakat dengan kondisi yang tidak memiliki tempat teduh/tinggal sehari-hari, kepala keluarga yang tidak bekerja, khawatir pernah tidak makan setahun terakhir, kebutuhan makanan lebih besar, kondisi tempat tinggal sebagian berlantai tanah, berdinding bambu, tidak memiliki jamban, dan sumber penerangan bukan dari listrik atau daya 450 volt ampere. Syarat utama calon penerima bantuan pangan beras 10 kg pada tahun 2025 yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dengan komponen sasaran penerima sebagai berikut berdasarkan (JUKNIS PELAKSANAAN PKH TAHUN 2024_PERDIRJEN 8.Pdf, 2024) :
 - 1) Ibu hamil dan menyusui
 - 2) Anak usia dini (0-6 tahun)
 - 3) Anak sekolah (SD, SMP, SMA)
 - 4) Lansia (di atas 60 tahun)
 - 5) Penyandang disabilitas

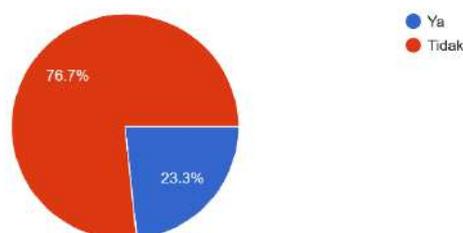
- c. Merupakan penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan syarat ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Fotocopy KK dan KTP
 - 2) Foto rumah tampak depan
 - 3) Masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- d. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki balita atau anak stunting
- e. Memiliki KTP dan KK
- f. Tidak berstatus ASN, Anggota Polri atau TNI
- g. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Berdasarkan persyaratan tersebut narasumber koordinator bantuan Kelurahan Tamansari menyatakan bahwa untuk penentuan kelayakan calon penerima bantuan pangan beras terdapat kriteria pendukung yang digunakan untuk memutuskan bahwa masyarakat tersebut layak menerima bantuan yaitu :

- a. Pekerjaan meliputi : pegawai swasta, pekerja lepas, wiraswasta, tidak/belum bekerja, nelayan, pedagang, petani.
- b. Kondisi rumah meliputi : kepemilikan rumah, jenis dinding, jenis atap, jenis lantai, sumber penerangan, bahan bakar memasak, sumber air minum, dan fasilitas buang air besar.

Berdasarkan hasil dari survei kepada masyarakat penerima bantuan dan tidak menerima bantuan bahwa saat ini masih banyak bantuan yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya, misalnya masyarakat yang berhak mendapat bantuan masih ada yang tidak mendapatkan bantuan dan sebaliknya untuk masyarakat yang dapat dikatakan mampu masih menerima bantuan contohnya seperti warga yang memiliki profesi sebagai pekerja lepas dengan kondisi rumah yang kurang layak tersebut tidak memperoleh bantuan. Berikut merupakan hasil survei penyebaran quisioner kepada masyarakat dengan responden sebanyak 30 data sampel yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Bondowoso dengan menghasilkan sebanyak 76,7 % menyatakan bahwa penyaluran bantuan pangan beras masih belum tepat sasaran.

Menurut yang anda ketahui dilingkungan, apakah bantuan pangan ini sudah tepat sasaran dalam penyalurannya?
30 responses



Gambar 1. 3 Hasil Survei Ketidak Tepatan Penyaluran Bantuan Pangan

Hal tersebut dapat terjadi karena pengajuan data masyarakat belum dapat di rekap dengan baik oleh pihak kelurahan sehingga mengalami kesulitan dalam menyeleksi calon penerima bantuan.

Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sistem yang mendukung pengambilan keputusan untuk menentukan warga yang lebih berhak mendapatkan program bantuan pangan beras. Apabila tidak ada sistem yang membantu untuk menyeleksi maka penyaluran bantuan tidak dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar membutuhkan dan pihak kelurahan akan tetap mengalami kesulitan dalam menyeleksi sehingga bantuan disalurkan kurang tepat sasaran. Dalam mengambil keputusan digunakan salah satu metode yaitu *Weighted Product* (WP) yang memiliki kosep dasar perhitungan dengan cara perkalian yang menghubungkan rating dari sebuah atribut dan atribut tersebut harus dipangkatkan dengan bobot atribut yang berhubungan (Seran et al., 2020). Pada penelitian ini peneliti memilih metode *Weighted Product* (WP) karena metode WP dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, akurat, dan sesuai dengan tujuan karena kerangka kerja yang kuat dalam mengintegrasikan preferensi subjektif dengan data objektif (Sabandar & Ahmad, 2023). Metode *Weighted Product* (WP) merupakan metode yang lebih relevan dibandingkan dengan metode *Simple Additive Weighting*(SAW) apabila diterapkan dengan nilai bobot yang sama menurut (Sri Mulyani, 2019). Penerapan Metode *Weighted Product* (WP) memberikan hasil yang objektif, efektif, efisien, dan semakin banyak kriteria yang digunakan maka semakin akurat hasilnya (Seran et al., 2020).

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk membantu dalam penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dapat membantu untuk mengatasi masalah tersebut, untuk itu peneliti memilih untuk melakukan penelitian tugas akhir dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Penerima Bantuan Pangan Beras dengan Metode *Weighted Product* (WP) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah yang dapat diselesaikan yaitu :

- a. Bagaimana cara membuat aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan penerima bantuan pangan beras?
- b. Bagaimana penerapan metode *Weighted Product* pada penentuan penerima bantuan pangan beras berbasis website?
- c. Bagaimana hasil pengujian terhadap sistem pendukung keputusan menggunakan metode *Weighted Product* dalam menentukan kelayakan penerima bantuan pangan beras?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu :

- a. Membuat aplikasi sistem pendukung keputusan penerima bantuan pangan beras.
- b. Menerapkan metode *Weighted Product* pada penentuan penerima bantuan pangan beras berbasis website.
- c. Mengetahui hasil pengujian terhadap penerapan metode *Weighted Product* pada sistem pendukung keputusan penerima bantuan pangan beras.

1.4 Manfaat

Terdapat manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Dapat mempermudah perangkat kelurahan dalam proses pemilihan masyarakat yang layak mendapat bantuan lebih mudah dan efisien sehingga lebih tepat sasaran.
- b. Masyarakat akan merasa adil apabila bantuan sudah tepat sasaran.